

ABSTRAK

Indonesia sebagai sebuah negara agraris yang sebagian besar wilayahnya memiliki potensi peternakan yang sangat besar dan beragam potensi peternakan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Sektor peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, namun peternakan tersebut belum cukup mampu memberikan kemakmuran ekonomi terhadap masyarakat Indonesia. Untuk dapat mencapai kemakmuran ekonomi tersebut sumberdaya peternakan harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan dimasa yang akan datang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berada di lingkungan peternakan pada peternakan ayam di kec. Brati kab. Grobogan mengenai tanggung jawab pelaku pembangunan peternakan terhadap masyarakat disekitar dan perizinan pembangunan tersebut..

Metode penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer ini diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu. Untuk mengumpulkan data sekunder dengan menganalisis Undang-Undang dan mengumpulkan bahan kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah tanggung jawab pelaku pembangunan peternakan terhadap masyarakat disekitar dan perizinan pembangunan tersebut di kec. Brati kab. Grobogan yang pelaksanaanya harus sesuai dengan Undang Undang Nomor : 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan Surat Keputusan Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan Nomor : 17/Kpts/PD.640/F/02.04

Simpulan yang didapat penulis yaitu bahwa bekerjanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal melindungi konsumen atau masyarakat dari pembangunan peternakan disekitar permukiman. Peran pemerintah dalam mengawasi dalam hal tersebut untuk kesejahteraan rakyat dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Kata Kunci : Perlindungan, Masyarakat, Peternakan

ABSTRACT

Indonesia as an agricultural country, most of whose territory has a very large potential for livestock and the potential for livestock is an economic potential that can be utilized for the future of the nation, as the backbone of national development. The livestock sector is a source of income for the community and the region, but the livestock sector has not been able to provide economic prosperity for the Indonesian people. To be able to achieve economic prosperity, livestock resources must be managed properly and optimally utilized for the present and the future.

The purpose of this study was to examine problems regarding the implementation of legal protection for people living in the environment of the chicken farm in the district. Brati district. Grobogan regarding the responsibility of livestock development actors to the surrounding community and the development permit.

This research method is based on legal research conducted with a qualitative non-doctrinal approach. This research data includes primary data and secondary data. This primary data was obtained through informants and certain social situations, which were selected purposively, by determining the informants and initial social situations first. To collect secondary data by analyzing laws and collecting literature. The analysis technique used is descriptive qualitative.

The results of the research obtained from the research and discussion that have been carried out are the responsibility of the actors of livestock development to the surrounding community and the development permit in the district. Brati district. Grobogan whose implementation must be in accordance with Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health and the Decree of the Director General of Livestock Production Development Number: 17/Kpts/PD.640/F/02.04

The conclusion obtained by the author is that the operation of Law Number 18 of 2009 concerning animal husbandry and animal health with Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in terms of protecting consumers or communities from the construction of farms around settlements. The role of the government in overseeing this matter is for the welfare of the people and business actors.

Keywords: *Keywords: Protection, Community, Animal Husbandry*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية